

## Pandemi Covid-19: Ekonomi Dan Kemiskinan Kota Surabaya

M Fikri Amrullah<sup>1\*</sup>, Hendra Hendra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Pendidikan Geografi, FIS, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

\* Penulis Korespondensi. Email: [m\\_fikri\\_amr@mail.unnes.ac.id](mailto:m_fikri_amr@mail.unnes.ac.id)

### Article Info

(Diterima : 12-Desember-2022; Disetujui: 06-Maret-2023; Online: 30-Maret-2023)



©2022 The Authors. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ).

### ABSTRAK

Pembatasan kegiatan masyarakat saat virus Covid-19 melanda, telah menghentikan hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat di Kota Surabaya. Khususnya pada pergerakan sosial masyarakat yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Angka pengangguran yang semakin meningkat merupakan salah satu efek langsung dari adanya pandemi. Secara umum efek dari penyebaran virus Covid-19 terhadap perekonomian yang sangat masif, akan berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada sebelum dan sesudah pandemi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perubahan jumlah penduduk miskin dan pengaruh pandemi bagi kondisi perekonomian penduduk Surabaya. Penelitian deskriptif ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selama pandemi peningkatan jumlah penduduk miskin di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembatasan lapangan pekerjaan, PHK, kurangnya produktivitas akibat terjangkit Covid-19, dll. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Surabaya berjumlah 4,51% sementara setelah pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 5,21% pada tahun 2021.

**Kata Kunci:** pandemi; covid-19; kemiskinan

### ABSTRACT

*The restrictions on community activities during the Covid-19 pandemic have brought nearly all aspects of community life in Surabaya City to a halt, particularly social movements within the community that directly impact economic activities. The increasing unemployment rate is one of the direct effects of the pandemic. In general, the massive impact of the spread of the Covid-19 virus on the economy will significantly affect the changes in the number of poor people in Surabaya City before and after the pandemic. The objective of this research is to identify changes in the number of poor people and the influence of the pandemic on the economic conditions of Surabaya residents. This descriptive study utilizes secondary data sourced from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik). During the pandemic, the increase in the number of poor people in Surabaya was influenced by several factors such as job restrictions, layoffs, reduced productivity due to Covid-19 infection, and others. In 2019, the number of poor people in Surabaya amounted to 4.51%, while after the Covid-19 pandemic, the number of poor people increased to 5.21% in 2021.*

**Keywords:** Pandemic ; Covid-19 ; poverty

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh negara berkembang. Jumlah penduduk yang tinggi namun keterserapan tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu problem yang saat ini dialami Indonesia. Akibatnya akan mendorong tingkat kemiskinan dan telah menjadi masalah utama bagi Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam kondisi ini, individu tersebut tidak mampu memperoleh pangan yang cukup, sandang yang layak, akses kesehatan yang memadai, tempat tinggal yang layak, dan pendidikan yang memadai. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang ditetapkan untuk menentukan apakah seseorang atau keluarga berada dalam kondisi kemiskinan atau tidak. Dalam situasi kemiskinan, individu atau keluarga seringkali menghadapi tantangan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka (Hasibuan et al., 2019). Beberapa faktor menyebabkan penduduk di Indonesia masih tergolong dalam kategori miskin. Diantaranya; lapangan pekerjaan yang kurang, sumber daya manusia yang memiliki kualitas rendah sehingga mempersulit persaingan dalam memperoleh pekerjaan (Faradila & Imaningsih, 2022)(Zuhdiyaty & Kaluge, 2017).

Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Terdapat dua macam kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melampaui suatu garis kemiskinan yang sudah ditetapkan atau sesuai pada indikator atau kriteria yang akan digunakan (Prawoto, 2008)(Rahman et al., 2019).

Dalam pendekatan kemiskinan absolut, penentuan kemiskinan dilakukan dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan beras dan gizi seperti kalori dan protein. Pendekatan ini menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang atau keluarganya berada di bawah garis kemiskinan. Pendapatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kemiskinan. Jika pendapatan seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan pokok, maka mereka dianggap berada dalam kondisi kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan dapat diungkapkan. Informasi ini penting untuk memahami tingkat kemiskinan di suatu populasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Ningtias & Anwar, 2021).

Teori kemiskinan menggunakan paradigma demokrasi-sosial yang melihat kemiskinan sebagai persoalan struktural. Adanya ketidakadilan dan ketimpangan di dalam masyarakat yang berpotensi mengakibatkan kemiskinan di masyarakat (Febrianti, 2017). Negara memiliki peran yang sangat vital terutama dalam merumuskan strategi dalam menanggulangi kemiskinan secara institusional (lembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Strategi dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori ini, yaitu penyaluran pendapatan secara universal, perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebijakan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengukur kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan pendekatan dari World Bank. Pendekatan tersebut memandang kemiskinan sebagai

ketidakmampuan seseorang atau keluarga dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (Zainur, 2020). Seseorang dianggap miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. World Bank menyatakan kemiskinan sebagai tercabutnya hak seseorang atau keluarga dari kehidupan yang layak. Berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang menjadi miskin bukan berasal dari kelemahan mereka, tetapi keadaan yang terjadi di luar kendali mereka.

Pada akhir tahun 2019, munculnya virus baru di kota Wuhan, China, mengejutkan dunia. Virus ini kemudian diidentifikasi sebagai virus korona (*Coronavirus*) pada tahun 2020. Pada tanggal 31 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa Coronavirus telah menjadi sebuah bencana epidemi global yang dikenal dengan nama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Ing et al., 2020). Penyakit pernapasan ringan merupakan salah satu ciri-ciri awal terinfeksi virus corona (Singhal, 2020). Tetapi pada anak-anak, orang tua, dan yang memiliki penyakit lain seperti pernapasan kronis, kardiovaskular, dan diabetes lebih memungkinkan mengalami penyakit serius hingga kematian. Kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana skala nasional (Syakurah & Moudy, 2020).

Pada Februari 2021 terdapat 1.191.990 penduduk Indonesia yang dinyatakan terinfeksi Covid-19. Dalam rangka untuk menekan penyebaran virus tersebut pemerintah Indonesia memberlakukan larangan bepergian dan mudik bagi perantau di seluruh Indonesia (Muliati, 2020). Beberapa kebijakan pemerintah dinilai belum mampu menghambat laju penularan Covid-19 hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan mobilitas serta aktivitas masyarakat di luar rumah sangat terbatas (Chaniago & Suwarso, 2021). Kebijakan PSBB mengharuskan sebagian besar industri, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, pariwisata, dan instansi pendidikan membatasi dengan ketat aktivitasnya bahkan dilarang beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Hal tersebut dapat berimbas pada kerugian ekonomi serta terganggunya mata rantai pasokan kebutuhan juga produksi barang dan jasa (Firdaus et al., 2020).

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan hampir seluruh sektor dan sendi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia terutama pada mobilitas sosial dan perekonomian (Ghiffari, 2020). Negara berkembang di Asia dinilai lebih sulit untuk mengatasi Covid-19 karena kurangnya akses fasilitas dasar tidak seperti pada negara maju, sehingga negara dengan penghasilan rendah akan lebih rentan pada saat pandemi (Sari, 2020). Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 menjadi minus 5,32% hal itu terjadi karena dampak pandemi yang berkepanjangan (Soleha, 2020). Menurunnya tingkat konsumsi dan ketidakpastian bursa saham di masa pandemi berimbas pada sektor ketenagakerjaan yang terpaksa merumahkan karyawan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Sitohang, 2021). Kementerian ketenagakerjaan mencatat terdapat 2.084.593 orang yang di PHK karena Covid-19 (Putri et al., 2021). Hal tersebut menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran dan menjadikan seseorang lebih mudah berada dalam kondisi miskin yang secara agregat akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain angka kematian dan pengangguran, angka kemiskinan juga ikut meningkat selama masa pandemi (Kasna, 2020). Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2017-2019 berturut-turut pada semester I (Maret) dan semester II (September) jumlah penduduk miskin di Indonesia (jiwa) 27.771.220; 26.582.990; 25.949.800; 25.674.580; 25.144.720; 24.785.870. Berdasarkan data tersebut tiap tahun jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan 2-3% per tahun. Kemudian pada tahun 2020 pada saat kondisi awal pandemi jumlah

penduduk miskin di Indonesia meningkat hingga 8-9%, yakni mencapai 26.424.020 pada bulan Maret dan 27.549.690 jiwa pada bulan September (Irawan, 2022).

Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-empat provinsi dengan jumlah penduduk terkonfirmasi Covid-19 terbanyak dan tingkat mortalitas paling tinggi di Indonesia. Tingginya kasus positif Coronavirus di Jawa Timur mengakibatkan sektor ekonomi yang melemah terutama dalam bidang distribusi barang dan jasa serta pariwisata. Kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas bagi masyarakat juga berimbas pada pedagang dan usaha-usaha kecil. Selain PHK, banyak pula pelaku usaha yang mengalami kerugian di masa pandemi. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur pada tahun 2018-2020 secara berturut-turut 3,91%; 3,82%; 5,84%. Dari data tersebut jumlah tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur naik sebesar 2,02%.

Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur turut serta menjadi salah satu kota yang jumlah penduduk terkena virus corona cukup banyak. Bahkan jika dilihat pada grafik berwarna, Kota Surabaya berada pada wilayah yang berwarna merah tua yang artinya jumlah penduduk terinfeksi Covid-19 sangat banyak (Julianto et al., 2021). Tentu hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Surabaya. Oleh karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang sangat luas, perlu dilakukan analisis perubahan jumlah penduduk miskin di Surabaya pada sebelum dan sesudah pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar perubahan jumlah penduduk miskin dan pengaruh adanya pandemi bagi kondisi perekonomian penduduk di Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai permasalahan perubahan jumlah penduduk miskin Surabaya pada saat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 perlu dilakukan.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder serta data kualitatif berupa informasi yang direpresentasikan dalam identifikasi dan analisis (Sugiyono, 2013). Data sekunder diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik Surabaya, studi pustaka dari jurnal serta artikel ilmiah, buku, dan laman resmi lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan olah data sekunder. Visualisasi data kuantitatif dibuat dalam bentuk grafik perbandingan antara tahun 2018-2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada tahun 2020 telah merubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Secara umum di kota-kota besar seperti Surabaya merasakan efek yang luar biasa. Pandemi telah mengganggu pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya yang bergerak menurun dan membuat stabilitas perekonomian penduduk cenderung rendah serta berada dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Surabaya pada tahun 2021 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan yang meningkat ini juga dipicu adanya pandemi covid-19. Menurut data BPS Surabaya, jumlah tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 mencapai 5,76%, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami kenaikan 4% menjadi 9,79%. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan

sejauh mana persentase angkatan kerja yang mengalami pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak angkatan kerja yang tidak dapat ditempatkan di pasar kerja.

Perubahan jumlah penduduk miskin di Surabaya selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 selama bulan Maret 2021 sebanyak 20.000 kasus meningkat dua kali lipat dari kondisi September 2020 yakni 10.012 kasus. Hal ini mempengaruhi masa produktif dan tingkat kesehatan penduduk itu sendiri. Penduduk dibatasi oleh isolasi mandiri sehingga pekerjaan juga tertunda sementara. Pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor atau instansi, harus ditunda dan dilakukan di rumah atau *work from home*. Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan berkerumun sehingga perilaku mobilitas penduduk cenderung menurun. Perusahaan, tempat perdagangan/ritel, pertokoan, para pedagang kaki lima, wahana rekreasi, taman, dan tempat pariwisata yang sebelumnya ramai pengunjung dan karyawan kehilangan pemasukan setiap harinya karena adanya pembatasan kegiatan demi menekan penyebaran Covid-19.

Secara umum pemutusan hubungan kerja paling tinggi terjadi di Jawa Timur yaitu kurang lebih sekitar 36 ribu tenaga kerja yang terkena PHK pada masa Covid-19 di tahun 2020 (Akhmad & Rachmawati, 2021). Secara lebih rinci Kota Surabaya sendiri juga merupakan daerah dengan tingkat PHK yang tinggi, yaitu sejumlah sekitar 7 ribu jiwa dari 341 perusahaan. Hal ini tentu dampak dari menurunnya produksi barang karena permintaan barang saat pandemi sangat rendah (Barata, 2022). Jika dilihat dari data pengeluaran per kapita dalam satu bulan baik makanan maupun non makanan, tahun 2019 sebesar 2.027.599 per kapita per bulan. Sedangkan pada awal pandemi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.879.145 per kapita per bulan. Tentu banyak faktor dalam pengambilan keputusan pada setiap individu, salah satunya karena kondisi ekonomi yang belum stabil pada awal pandemi (Saraswati, 2020).



**Gambar 1.** Grafik Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018-2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, grafik tersebut menunjukkan jumlah penduduk mengalami keadaan fluktuatif peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021. Sebelum pandemi Covid-19 jumlah penduduk Surabaya adalah 2.888.555 jiwa dan mengalami penurunan yang rendah sebanyak 8.271 jiwa pada masa pandemi tahun 2021. Kepadatan dan tingginya jumlah penduduk ikut berkontribusi dalam penyebaran Covid-19. Tingginya mobilitas di Jawa Timur terutama pada wilayah kota yang padat menyebabkan penyebaran Covid-19 lebih mudah. Kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial oleh pemerintah memiliki dampak yang lebih besar terhadap wilayah kota Surabaya dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di sekitar Surabaya. Pembatasan sosial tersebut berpengaruh pada kondisi perekonomian penduduk. Banyak penduduk yang sebelumnya tidak berada dalam kondisi miskin pada akhirnya menjadi miskin karena adanya pembatasan sosial yang mempersulit dalam melakukan pekerjaan.



**Gambar 2.** Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2018-2021

Sejalan dengan penduduk yang terus bertambah meskipun masa pandemi berlangsung, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Surabaya berjumlah 130.550 jiwa atau sebesar 4,51% sementara setelah pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin menjadi 152.490 jiwa atau 5,21% pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula penduduk miskin baru pada masa pandemi. Tiga data mengenai perubahan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin memiliki pola yang sama yaitu sama-sama meningkat hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan dari tahun 2019 baik data jumlah penduduk maupun jumlah penduduk miskin. Pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal 2020 sehingga memiliki kemungkinan menyumbang faktor terhadap terjadinya peningkatan penduduk miskin di Jawa Timur.

Peningkatan jumlah kemiskinan di Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena adanya pembatasan mobilitas akibat pandemi, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rizqya, 2022). PSBB yang dilakukan di Surabaya tentu merupakan Upaya untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19. Namun disisi lain, aktivitas ekonomi di Surabaya menjadi tidak seimbang dan akan melumpuhkan keadaan ekonomi regional (Ilyas, 2021). Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya sudah sangat maksimal, PSBB yang bertujuan untuk mengurangi penyebarin virus Covid-19 dilakukan sampai III jilid (Perdana et al., 2021). Kota Surabaya yang menjadi pusat industri di Provinsi Jawa Timur dan menjadi tempat tujuan bagi para pekerja di wilayah gerbangkertasusila berpotensi memiliki dampak yang cukup luas (Wahyudi et al., 2021). Berdasarkan Data dari pemkot, salah satu wilayah yang ditutup karena PSBB adalah pintu masuk dari luar kota, seperti Bundaran Waru yang menghubungkan Surabaya dengan Gresik, Mojokerto, Sidoarjo. Dan beberapa pintu masuk dari wilayah pantura seperti wilayah Gresik dan Lamongan juga dilakukan pembatasan (Asmono et al., 2022).

Kasus penyebaran Covid-19 yang mendunia mengakibatkan semua aktivitas masyarakat dan perekonomian di Surabaya menjadi redup dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Munculnya pandemi berujung pada terjadinya penurunan pendapatan per kapita disebabkan semakin rendahnya peluang lapangan kerja, kendala waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Penurunan pendapatan pekerjaan memiliki hubungan adanya pembatasan masyarakat dalam melakukan mobilitas perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur memiliki profesi yang mengandalkan upah harian, baik itu dari kegiatan berdagang, pariwisata (hotel dan agen travel), serta kegiatan perekonomian lainnya. Kebijakan memberlakukan lockdown atau mengunci akses masuk dan keluar wilayah akan sangat merugikan bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian di Surabaya serta menurunkan jumlah penduduk miskin, pemerintah terus gencar melaksanakan program-program. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis pada masa pandemi karena mayoritas tenaga kerja diserap melalui UMKM. Salah satu Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi digital marketing yang dilakukan dengan tujuan mengurangi interaksi langsung antar masyarakat (Alysia, 2021). Optimalisasi UMKM, peluncuran produk aplikasi E-Peken, pelatihan peningkatan softskills bagi warga terdampak, pemanfaatan lahan tidur, program renovasi rutilahu dll. Disisi lain Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan juga dilakukan melalui pendekatan ekonomi kreatif, yaitu melihat peluang dan potensi yang ada di suatu wilayah (Evanthi et al., 2022) .

Pemerintah pusat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan khusus untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tindakan ini diambil mengingat seberapa besar pengaruh UMKM terhadap perekonomian nasional. Program PEN dirancang untuk memberikan stimulus dan bantuan kepada UMKM dalam rangka memulihkan dan mengembangkan sektor tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM melewati tantangan yang dihadapi selama masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Melalui program ini, pemerintah menyediakan berbagai insentif, bantuan keuangan, pelatihan, akses ke pasar, dan upaya lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan fokus pada UMKM, program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap bahwa melalui upaya pemulihan yang ditujukan secara khusus kepada UMKM, sektor ini dapat bangkit, berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat secara umum (Atmodjo & Akhmadi, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menjalankan program pembangunan lapak UMKM di setiap kelurahan. Tujuan dari program ini adalah untuk menghidupkan kembali perputaran ekonomi secara merata, yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Program pembangunan lapak UMKM bertujuan untuk memberikan tempat yang strategis bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya lapak ini, UMKM dapat memiliki akses yang lebih baik untuk berjualan, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan visibilitas produk mereka (Jannah, 2020).

Dalam situasi di mana lapangan pekerjaan semakin terbatas akibat kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterapkan selama pandemi COVID-19 di Indonesia, memiliki SDM yang unggul dengan *hardskill* dan *softskill* yang baik dapat menjadi modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penduduk usia produktif, terutama generasi muda dan generasi *millennial*, memiliki potensi untuk menyalurkan ide dan inovasi mereka dalam mendukung perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi ketidakstabilan saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau bidang usaha lainnya. Dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, generasi muda dan *millennial* dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memulai usaha sendiri atau menjadi wirausahawan. Dengan memanfaatkan teknologi dan konektivitas yang ada, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui inovasi produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, mereka juga dapat berkolaborasi dengan pihak lain dalam menciptakan proyek atau *start-up* yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, *softskill* seperti kreativitas, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan kerja tim juga menjadi penting untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM dan memberikan pelatihan serta pendampingan bagi para pemuda dan generasi *millennial* yang ingin memulai usaha. Dengan adanya sinergi antara inisiatif individu dan dukungan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat perekonomian negara.

#### 4. SIMPULAN

Kemiskinan di Kota Surabaya secara perlahan mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 mulai mewabah secara luas di Indonesia. Penduduk miskin di Surabaya sesudah mewabahnya pandemi mengalami peningkatan jumlah dibandingkan pada tahun 2019 sebelum Covid-19 memasuki Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi paling tinggi di daerah perkotaan karena sektor perekonomian di perkotaan lebih kompleks daripada sektor di perdesaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk secara keseluruhan, semakin banyak pula penduduk miskin baru selama masa pandemi di Jawa Timur. Perubahan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tambahan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19, tingginya pekerja yang terkena PHK, pemberlakuan pembatasan sosial, peluang lapangan pekerjaan berkurang dan inflasi umum. Strategi

Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya memulihkan perekonomian pasca dilanda Covid-19 diimplementasikan dalam berbagai program. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak swasta bertujuan menggerakkan roda ekonomi masyarakat demi menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan laju perekonomian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad, R. F., & Rachmawati, L. (2021). Fenomena PHK Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Fresh Graduate Jurusan Ilmu EKonomi Universitas Negeri Surabaya. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(1), 157–169.
- Alysia, V. (2021). Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui E-Peken dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya: Pertumbuhan Ekonomi melalui UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.117>
- Asmono, Y. A., Radjikan, R., & Kusnan, K. (2022). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Sebagai Upaya Pengendalian Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 70–88. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/217>
- Atmodjo, S. Y. P., & Akhmadi, M. H. (2021). Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19 Pada Satker di Wilayah KPPN SURABAYA II. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 144–166. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5600>
- Barata, M. S. (2022). *Fenomena stres pada keluarga sebagai dampak dari PHK selama pandemi Covid-19*. March.
- Chaniago, R. H., & Suwarso, R. C. (2021). Analisis Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8), 4044–4064. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3740>
- Evanthi, A., Rosyanti, D. M., Azhar, R. M., Hardi, I., & Orlando, G. H. (2022). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Kampung Kue Surabaya Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1433–1439.
- Faradila, S., & Imaningsih, N. (2022). Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sampang. *JDEP*, 5(1). <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.313>
- Febrianti, T. (2017). Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Wilayah Pesisir. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1(1), 71–78. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v1i1.34>
- Firdaus, S. A., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A. D., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk meningkatkan perekonomian selama pandemi COVID-19 pada saat new normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.46-62>
- Ghiffari, R. A. (2020). Dampak populasi dan mobilitas perkotaan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 di Jakarta. *Tunas Geografi*, 9(1), 81–88. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.18622>
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis sebaran dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>

- Ilyas, F. (2021). Analisis swot kebijakan pembatasan sosial berskala besar (psbb) dan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (ppkm) terhadap dampak ekonomi di tengah upaya menekan laju pandemi covid-19. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(3), 190–198. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1559>
- Ing, E. B., Xu, Q., Salimi, A., & Torun, N. (2020). Physician deaths from corona virus (COVID-19) disease. *Occupational Medicine*, 70(5), 370–374. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa088>
- Irawan, A. D. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- Jannah, F. M. (2020). Peningkatan ekonomi di tengah pandemi dalam menunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1427–1432. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.243>
- Julianto, G. S., Hadi, I. P., & Vidyarini, T. N. (2021). Analisis Isi Crisis & Emergency Risk Communication Pandemi COVID-19 pada Facebook Bangsa Surabaya. *Jurnal E-Komunikasi*, 9(2). <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11491/10099>
- Kasna, I. K. (2020). Dampak Pengangguran Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 58–61. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.202>
- Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 78–86. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2.874>
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714>
- Perdana, Y., Kinanti, A. D., Kurniawati, F., & Ardani, S. (2021). Problematika Tiga Kota dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Jakarta, Surabaya, dan Bogor). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 89–98. <https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926>
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Putri, R. K., Sari, R. I., Wahyuningsih, R., Meikhati, E., & Aji, A. W. (2021). Efek Pandemi Covid 19: Dampak lonjakan angka PHK terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 72–77.
- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542–1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>
- Rizqya, S. N. (2022). Dampak kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak konstitusional warga negara saat krisis Pandemi COVID-19. *Jurnal Politique*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.13-26>
- Saraswati, H. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap pasar saham di Indonesia. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i2.696>
- Sari, Y. I. (2020). Sisi terang pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 89–94. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94>

- Singhal, T. (2020). A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). *The Indian Journal of Pediatrics*, 87(4), 281–286. <https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6>
- Sitohang, S. (2021). Gambaran Pergerakan Indeks Sektorial Dan Ihsq Di Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Periode Februari 2020-Februari 2021). *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 115–126. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25712>
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional. *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i2.2881>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syakurah, R. A., & Moudy, J. (2020). Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(3), 333–346. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4i3.37844>
- Wahyudi, S. T., Khusaini, M., & Nabella, R. S. (2021). Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 117–129. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1905>
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.54576/annah.v7i1.3>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>